



DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.
- Backtiar (e-book), *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015
- C.S.T. Kansildan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, 2008.
- _____, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Dahan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, Rajawali, 2003.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, RinekaCipta, 1994.
- Feri Amsari, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Inodonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Rajawali, 2001.
- Handoko Duwi (e-book), *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Pekanbaru, Hawa dan Ahwa, 2015.
- Harahap M.Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Huda Ni'matul, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta, Rajawali, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok, Rajawali Pers, 2017.
- Jimly Asshiddiqie (e-book), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali, Jakarta, 2010.
- Muhammad Yahir Azhary Prof Dr.H.SH, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2012.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasution Mirza (e-book), *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Puspantara, 2015.

Panduan Penyusunan Skripsi, Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum, 2014.

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Kencana, 2012.

Syahuri Taufiqurahman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, SinarGrafika, 2015.

Diah Savitri, Jurnal Cita Hukum Vol.1 No.2 Desember 2013, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung*, 2013.

Sulasi Rongiyati, Info Singkat Vol. V, No.02/II/P3DI/Januari/2013, *Menjaring Hakim Berinteritas Melalui Seleksi Calon Hakim Agung*, 2013.

I Ketut Bayu Pawana, Jurnal IUS Vol. II No.5 Agustus 2014, IPDN Kampus NTB Kepala Unit Pengamanan Dalam, *Kewenangan DPR dalam Melaksanakan Uji Kepututan Dan Kelayakan Bai Calon Pejabat Publik Dari Aspek Ketatanegaraan*, 2014.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK NOMOR 27/PUU-XI/20013.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

<https://www.DPR> Loloskan Tiga Calon Hakim Agung – SINDOnews.(dilihat pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 22.00 WIB)

[https://www. DPR Uji Kelayakan dan Kepatutan 5 Calon Hakim Agung – detikNews \(dilihat pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 22.41 WIB\)](https://www.detikNews.com)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.